

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020



KECAMATAN RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Ranah Pesisir ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan tahun 2020 pada Kecamatan Ranah Pesisir, maka disusunlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Kecamatan Ranah Pesisir tahun 2020 untuk mendukung LKPJ akhir tahun anggaran yang nantinya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD dalam rapat paripurna DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.



Balai Selasa, Januari 2021

KAMAT RANAH PESIR

ARZIL, S.Sos

Embina Tk I IV/b

NIP. 19650101 198602 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- | | |
|------------------------|---|
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Dasar Hukum | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 4 |

BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

- | | |
|--|----|
| 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | 5 |
| 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah | 6 |
| 2.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | 7 |
| 2.4 Penghargaan | 14 |

BAB III TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN ATAS LKPJ BUPATI PESISIR SELATAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020

15

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

- | | |
|---|----|
| 4.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya | 17 |
| 4.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya | 17 |

BAB V PENUTUP

18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2020 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2020 Bupati Pesisir Selatan berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD Kabupaten Sumatera Barat. LKPJ Bupati Pesisir Selatan ATA 2020 disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

LKPJ Bupati Pesisir Selatan ATA 2020 tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Sumatera Barat, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumatera Barat.

1.2 DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumatera Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan LKPJ Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dimaksudkan sebagai penjabaran rencana strategis sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Kecamatan Ranah Pesisir yang professional dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sekaligus pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di nagari dalam Kecamatan Ranah Pesisir.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan LKPJ Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 bertujuan agar penyelenggaraan program/kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur selama tahun anggaran 2020 guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kecamatan Ranah Pesisir dalam penerapan azas transparansi, sistematis dan *accountable*.

BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KECAMATAN RANAH PESISIR

2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan	Persen	82%	80	
2.	Jumlah Nagari berkinerja baik	Nagari	10	10	
3.	Nilai evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	Nilai	BB	B	

2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan nagari, dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari.

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Ranah Pesisir

SASARAN	Indikator Sasaran	Penjelasan/Formulasi /Perhitungan	Sumber Data dan Penanggungjawab
Meningkatnya Nilai Lakip Kecamatan Ranah Pesisir	Nilai LAKIP Kecamatan Ranah Pesisir	Nilai Evaluasi dari Inspektorat	Penanggung Jawab : Sekcam Sumber Data : Semua OPD
Peningkatana mutu pelayanan tiap-tiap Kepala Seksi	Meningkatkan kualitas pelayanan public	Rata-rata Nilai Pelayanan Public	Penanggungjawab : Kasi Pelayanan Sumber Data : Kasi Pelayanan
Meningkatnya kehidupan masyarakat yang memiliki nilai budaya dan agama	Mesjid yang memiliki TPQ yang aktif	$\frac{\text{Jumlah TPQ} \times 100\%}{\text{Jumlah Mesjid}}$	Penanggungjawab Kasi Kesra Sumber Data : Kasi Kesra
	Peringkat MTQ Tingkat Kabupaten	Peringkat MTQ Tingkat Kabupaten	Penanggungjawab : Kasi Kesra Sumber Data : Kasi Kesra
	Pembinaan kelembagaan KAN	Jumlah KAN yang dibina	Penanggungjawab : Kasi Trantib Sumber Data : Kasi Trantib

2.3. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 2.3
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2020	Realisasi	Capaian (%)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Perbaikan pada kinerja ASN yang berada Di wilayah kerja Kecamatan Ranah Pesisir	Nilai Lakip Kecamatan Ranah Pesisir	BB(75)	97%	80%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhi nya Layanan Administrasi perkantoran	Bulan	12	12	165.815.309	164.682.689	99,5
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	ketersediaa n air, listrik dan jasa komunikasi	Bulan	12	12	22.200.000	21.092.380	100
						Peyediaan jasa administrasi keuangan	ketersediaa n layanan administrasi keuangan	Bulan	12	12	37,618,246	37,618,246	100
						Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	ketersediaa n jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	16,573,209	16,573,209	100
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	ketersediaa n alat tulis	Bulan	12	12	28,064,824	28,064,824	100

No	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2020	Realisasi	Capaian (%)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan barang cetak dan penggandaan	Bulan	12	12	11,543,666	11,543,666	100
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Bulan	12	12	5,227,864	5,227,864	100
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	ketersediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Bulan	12	12	3.600.000	3.600.000	100
						Penyediaan Makanan dan Minuman	ketersediaan makan dan minum pegawai, rapat dan tamu	Bulan	12	12	27.537.500	27.537.500	100
						Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan	Bulan	12	12	325.000	325.000	100

No	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2020	Realisasi	Capaian (%)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
							konsultasi keluar daerah						
						Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bulan	12	12	13.125.000	13.125.000	100
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kerja	Persen	100	100	121.945.908	121.945.908	100
						Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor dibeli	Persen	100	100	15.000.000	15.000.000	100
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terpeliharanya gedung kantor	Persen	100	100	34.988.756	34.988.756	100
						Pemeliharaan Rutin/berkala	terpeliharanya	Persen	100	100	70.217.152	70.217.152	100

No	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2020	Realisasi	Capaian (%)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
						Kendaraan Dinas/Operasional	kendaraan dinas camat ranah pesisir						
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor	Persen	100	100	1.740.000	1.740.000	100
	Meningkatkan Mutu Pelayanan pada Masyarakat Tiap-tiap Kepala Seksi.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	80	75%	80%	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Nagari yang menerapkan lingkungan sehat	Persen	0	0	0	0	0
						Fasilitasi dan Pembinaan Lingkungan Sehat	terwujudnya fasilitas pembinaan lingkungan sehat	Persen	0	0	0	0	0
						Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/Nagari		Persen	100	100	49.611.278	49.611.278	100
						Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat	tercapainya fasilitas dan pembinaan lembaga sosial	Persen	100	100	34.511.278	34.511.278	100

No	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2020	Realisasi	Capaian (%)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
							ekonomi masyarakat						
						Memasyarakatkan Olahraga di Desa/Nagari	terwujudnya masyarakat yang sehat	Persen	100	100	15.100.000	15.100.000	100
						Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan/ kegiatan Musrenbang Nagari yang diverifikasi sesuai dengan program prioritas	Persen	100	100	3.506.000	3.506.000	100
						Penyelegaraan Musrenbang RKPD	terwujudnya penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Persen	100	100	3.506.000	3.506.000	100
	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Aparatur Pemerinthan Nagari dalam	Jumlah Nagari yang Menyelesaikan Admisnisrasi Keuangan Nagari dengan tertib	80	100%	80%	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa/ Nagari	Persentase peningkatan kualitas pengelolaa n keuangan Nagari	Persen	100	100	825.000	825.000	100

No	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2020	Realisasi	Capaian (%)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
	Adminirasi Pengelolaan Keuangan nagari	dan Benar dan tepat Waktu.											
						Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Nagari	tertib administrasi keuangan nagari	Persen	100	100	825.000	825.000	100
						Program pementapan Otonomi Daerah	Persentase tahapan penegasan batas wilayah administratif pemerintahan	Persen	0	0	0	0	0
						Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan	terwujudnya koordinasi muspika dan pembinaan kewilayahannya	Persen	0	0	0	0	0
	Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang	Pembinaan kelembagaan KAN	80%	50%	63%	Program Peningkatan IMTAQ		Persen	0	0	0	0	0

No	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2020	Realisasi	Capaian (%)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
	Memiliki Nilai Budaya dan Agma.												
						Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ	keikutsertaan dalam Penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan	Persen	0	0	0	0	0
						Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan	jumlah peringatan hari besar islam yang difasilitasi	Persen	0	0	0	0	0
						Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase penyelesaian kasus pemakai narkoba tingkat siswa dan aparatur	Persen	0	0	0	0	0
						Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	jumlah pelaksanaan PHBN	Persen	0	0	0	0	0
JUMLAH											341.703.494	340.570.875	99,67

2.4 Penghargaan

Tabel 2.4
Penghargaan yang Diraih Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2020

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Badan Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)
1	2	3	4	5	6
1	Penghargaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahap pertama sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia	Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir	Jakarta, 26 Mei 2020	

BAB III
TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI PESISIR SELATAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

Tabel 3.1
Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Akhir Tahun Anggaran 2019

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Perlu kiranya meningkatkan kapasitas SDM aparatur kecamatan yang pada gilirannya akan didapatkan aparatur yang professional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.	Kecamatan Ranah Pesisir telah melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur. Kegiatan ini dianggarkan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp.240.466.326	Aparatur yang profesional
2	Anggaran kecamatan masih kurang, kami sarankan tahun depan ditambah sehingga tugas sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan social kemasyarakatan bisa berjalan maksimal dalam pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari	Kecamatan Ranah Pesisir telah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah nagari. Kegiatan ini anggarakan pada Program Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari sebesar Rp.17.880.000	Pembinaan Perangkat Nagari
3	Banyak rumah masyarakat baik yang lama atau yang baru belum mempunyai IMB. Disarankan IMB diperdesaan didelegasikan oleh Bupati kepada camat, tentunya dengan melatih kasi Ekobang yang ada di Kecamatan	Kegiatan pelayanan IMB di Kecamatan Ranah Pesisir dilaksanakan oleh Kasi Pelayanan dengan Program Fasilitas Penyelenggaraan PATEN dengan anggaran sebesar Rp. 13.000.000	Pelayanan Permohonan IMB

4	Nagari merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fakta dilapangan, bila terjadi pergantian wali nagari maka perangkat nagari juga diganti oleh walinagari yang baru. Padahal untuk menjadi aparatur pemerintahan nagari yang handal memerlukan proses pembinaan dana yang besar. Untuk itu agar hal ini menjadi perhatian secara serius dan sungguh-sungguh.	Kecamatan Ranah Pesisir dalam kegiatan Rakor Wali Nagari, telah dilaksanakan pembinaan dan penjelasan terhadap wali nagari. Kegiatan ini dianggarkan pada Program Pemantapan Otonomi Daerah dengan anggaran sebesar Rp.6.000.000	
5	Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan tingkat nagari masih banyak ditemukan konflik antara wali nagari dengan bamus, untuk itu kami minta pada dinas pemberdayaan nagari agar membuat regulasi yang jelas serta pembinaan terhadap lembaga tersebut.		
6	Masih banyak ditemukan pemerintahan nagari dalam menyusun APB Nagari tidak sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang ada, untuk itu diminta perangkat daerah terkait untuk dapat melakukan pembinaan	Kecamatan ranah pesisir telah membentuk Tim Evaluasi dan Monitoring tentang APBNagari yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Ranah Pesisir. Kegiatan ini dianggarkan pada Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari sebesar Rp.17.880.000	Tersusunnya APBNagari

BAB IV

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN PENUGASAN**

**4.1 IDENTIFIKASI TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH TINGKAT DIATASNYA**

Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2020 tidak mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Daerah atau Pusat dalam melaksanakan urusan tertentu.

Tabel 4.1
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYE RAPAN (%)
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2					
3					
Total					

**4.2 IDENTIFIKASI TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DIBERIKAN KEPADA TINGKATAN PEMERINTAHAN
DIBAWAHNYA**

Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2020 tidak mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Nagari dalam melaksanakan urusan tertentu.

Tabel 4.2
Alokasi Anggaran dan Realisasi Penugasan Tahun 2020

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYE RAPAN (%)
1	NIHIL				
2					
3					
Total					

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di

masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2020 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Pesisir Selatan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.

Balai Selasa, Januari 2021
CAMAT RANAH PESISIR




ZUL ARZIL, S.Sos

Pembina Tk I IV/b

NIR 19650101 198602 1 004

A. PROGRAM DAN KEGIATAN**Urusan : Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar****OPD Pelaksana : Kecamatan Ranah Pesisir****KECAMATAN RANAH PESIR****LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN****TAHUN 2019****A. PROGRAM DAN KEGIATAN**

No	URUSAN/ORGANISASI/ PROGRAM/KEGIATAN		BELANJA (Rp)			
			ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
21. URUSAN OTONOMI						
	15.KECAMATAN RANAH PESIR		687.816.007	684.569.960	3.246.047	99,52%
	I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	213.504.260	213.472.301	31.959	99,99%
	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.000.000	18.000.000	-	100.%
	2	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	38.800.000	38.800.000	-	100%
	3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	14.716.245	14.715.492	753	99,99%
	5	Penyediaan alat tulis kantor	26.392.505	26.392.456	39	99,99%
	6	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	7.780.360	7.774.259	6.101	99,92%
	7	Penyediaan komponen instalasi listrik / pe nerangan bangunan kantor	9.657.584	9.657.584	-	100%
	8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	5.400.000	5.400.000	-	100%

	9	Penyediaan makanan dan minuman	40.782.566	40.772.500	-	100.%
	10	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5.875.000	5.875.000	-	100%
	11	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	46.100.000	46.085.000	15.000	99,97%
	II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	240.466.326	237.419.444	3.046.882	98,73%
	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	8.672.048	7.307.542	1.264.506	98,73%
	2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	76.294.278	75.941.902	352.376	99,54%
	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor	5.600.000	5.570.000	30.000	99,46%
	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	150.000.000	148.600.000	1.400.000	99,07%
	II I	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	13.000.000	13.000.000	-	100%-
	1	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum	13.000.000	13.000.000	-	100%-
	IV	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	50.270.000	50.270.000	-	100%
	1	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	50.270.000	50.270.000	-	100%
	V	Pemberdayaan lembaga Sosial dan Ekonomi masyarakat/nagari I	128.668.961	128.511.755	157.206	99,88%
	1	Pembinaan PKK Kecamatan	89.859.757	89.704.755	155.002	99,83%
	2	Pembinaan Bulan Bakti Gotong Royong	1.762.102	1.760.000	2.102	99,88%

	3	Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga	37.047.102	37.047.000	102	99,99%
	VI	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan	13.000.000	13.000.000	-	100.%
	1	Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN	13.000.000	13.000.000	-	100.%
	VI I	Program Pembangunan Pemasaran Parawisata	1.000.000	1.000.000	-	100 %
	1	Pergelaran Seni Budaya dan Potensi Daerah pada Festival Langkisau	1.000.000	1.000.000	-	100.%
	VI II	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.026.460	4.026.460	-	100%
	1	Penyelenggaraan Musrembang RKPD	4.026.460	4.026.460	-	100%
	IX	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Nagari	17.880.000	17.870.000	10.000	99,94%
	1	Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Keuangan Pemerintah Nagari	17.880.000	17.870.000	10.000	99,94%
	X	Program Pemantapan Otonomi Daerah	6.000.000	6.000.000	-	100%
	1	Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan	6.000.000	6.000.000	-	100%

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar dilaksanakan oleh Kecamatan Ranah Pesisir tahun 2019 terdiri dari 10 (Sepuluh) Program dan 24 (Dua puluh empat Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp **687.816.007,-** terealisasi sebesar Rp **684.569.960,-** (99.52 %) dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan kantor dalam rangka mempercepat kelancaran administrasi dan pelayanan di kantor yang terdiri dari Kegiatan: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Penyediaan jasa administrasi keuangan, Penyediaan jasa kebersihan kantor, Penyediaan alat tulis kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Penyediaan makanan dan minuman, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah, Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan dengan pagu anggaran sebesar Rp. **213.504.260,-** terealisasi sebesar Rp. **213.472.301-** (99,99 %).

Keluaran dari program ini adalah terlaksananya penyelenggaraan operasional kantor, dokumen perencanaan dan pelaporan Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2019.

Hasil yang dicapai lancarnya penyelenggaraan administrasi perkantoran dengan kemajuan fisik program sebesar 100 %.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor, Pengadaan peralatan gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan anggaran sebesar Rp **240.466.326,-** terealisasi sebesar Rp **237.419.444,-** (98,73 %).

Keluaran dari program adalah terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang baru, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang operasional kantor.

Hasil yang dicapai terpeliharannya sarana dan prasarana penunjang operasional kantor dengan kemajuan fisik program sebesar 100 %

3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum pagu anggaran Rp **13.000.000,-** terealisasi Rp **13.000.000,-** (100 %). Program

4. Program Pengembangan dan Wawasan Kebangsaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk rasa kebangsaan persatuan dan cinta tanah air, bangsa dan negara Republik Indonesia dan meningkatkan rasa adat basandi sarak ,sarak basandi kitabullah dan mempererat persaudaraan dengan mamak dan kepanakan melalui kegiatan Pelaksanaan upacara HUT RI pagu anggaran Rp **50.270.000** terealisasi Rp **50.270.000,-** (100 %).

Keluaran dari program ini adalah terlaksananya kegiatan Pelaksanaan upacara HUT RI tahun 2019 di Kecamatan Ranah Pesisir.

Hasil yang dicapai dari program ini adalah meningkatkan rasa kebangsaan persatuan dan cinta tanah air, bangsa dan negara Republik Indonesia.

5. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah potensi Kecamatan yang dapat diekspose baik dari segi budaya maupun produk unggulan Kecamatan dan hasil usaha ekonomi kreatif masyarakat di Kecamatan Ranah Pesisir melalui kegiatan Pelaksanaan festival langkisau dengan pagu anggaran Rp **1.000.000,-** terealisasi Rp **1.000.000,-** (100%). Keluaran dari program ini adalah terlaksananya kegiatan pagelaran seni budaya dan potensi daerah pada festival langkisau.

Hasil yang dicapai dari program ini adalah semakin dikenalnya potensi-potensi kecamatan di tingkat kabupaten.

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA/NAGARI

Program ini bertujuan untuk melakukan pembinaan, fasilitasi dan monitoring terhadap pengelolaan Keuangan Nagari (10 Nagari) di Kecamatan Ranah Pesisir melalui kegiatan Pembinaan dan pengawasan administrasi keuangan Pemerintah Nagari dengan pagu anggaran Rp **17.880.000,-** terealisasi Rp. **17.870.000,-** (99,94%).

Keluaran dari program ini adalah terlaksananya kegiatan pembinaan, pengelolaan keuangan pemerintah nagari.

Hasil dari program ini adalah meningkatnya kemampuan aparatur nagari dalam penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban serta pelaporan secara benar dan tepat waktu.

7. PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT/NAGARI

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan wilayah kecamatan melalui kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan, Pembinaan bulan bhakti gotong royong, Fasilitas Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga dengan Pagu anggaran Rp. **128.668.961,-** terealisasi Rp. **128.511.755,-** (99,88%) program ini adalah terlaksananya kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan, Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong.

8. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Penyelenggaraan Musrembang RKPD dengan pagu anggaran Rp.**4.026.460,-** terealisasi Rp **4.026.460,-** (100%). Hasil dari program ini adalah meningkatkan peningkatan mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, tertampungnya usulan-usulan pembangunan dari nagari-nagari dalam pelaksanaan musrembang tingkat kecamatan. Hasil dari program ini adalah meningkatkan peningkatan mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, tertampungnya usulan-usulan pembangunan dari nagari-nagari dalam pelaksanaan musrembang tingkat kecamatan.

9. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan.

Fasilitas Penyelenggaraan PATEN pagu anggaran Rp.**13.000.000,-** terealisasi Rp **13.000.000,-** (100%).

10. Program Pementapan Otonomi Daerah

Koordinasi pembinaan kewilayahan Fasilitas penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan dengan pagu anggaran Rp.**6.000.000,-** terealisasi Rp **6.000.000,-** (100%).

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dari evaluasi terhadap rencana dan pelaksanaan kegiatan tahun yang lalu terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya personil Kantor Camat Ranah Pesisir yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian, sehingga menyulitkan dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas-tugas yang dilaksanakan.
2. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan ASN di lingkungan Kecamatan Ranah Pesisir terhadap penggunaan dana terutama pada penggunaan aplikasi keuangan desa.

3. Terbatasnya anggaran tahun 2018 untuk Kecamatan Ranah Pesisir sehingga pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugas operasional pelayanan di Kecamatan Ranah Pesisir belum optimal.

Upaya dalam mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud di atas telah dilaksanakan oleh kecamatan Ranah Pesisir antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan SDM melalui pembekalan dan bimtek kepada personil Kantor Camat Ranah Pesisir sesuai dengan fungsi.
2. Penguatan personil yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan operasional pelayanan dan melakukan pendampingan terhadap dana desa melalui bimtek.
3. Peningkatan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Ranah Pesisir sehingga target, tujuan dan sasaran program dapat dioptimalkan.



Selasa, 13 JANUARI 2020

CAMAT RANAH PESISIR,

ZUL ARZIL, S.Sos

19650101 198602 1 004